

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Anshari Ritonga, *Pembaharuan Perpajakan dan Hukum Fiskal Forml Indonesia*, Jakarta: Pustaka El Manar, 2007.
- Ahmad Dimiyati, *Standar Kyoto Convention Dalam Perundang-undangan Kepabeanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia, 2015.
- Ali Purwito, *Kepabeanaan: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2006.
- Anwarul Yakin, *Legal research and Writing LexisNexis*, 2007.
- Arfin & Leonard Sambas K: *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet.5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Sutiyoso; *Metode Penemuan Hukum*: Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dhaniswara K. Harjono; *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta; UKI Press 2021.
- Dirk.J. Wolison, *Publik Finance and Development Strategy*, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1979.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: sinar Grafika, 2018.
- Erman Rajagukguk; *Hukum investasi*: Depok, PT. Rajawali Pers, 2019
- Feliks Thadeus Liwupung, “*Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du’a Mo’ang (Lembaga peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikka Flores NTT*”, tanpa tahun.
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler, 1973.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2013
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Harrys Pratama Teguh, *Hukum Keuangan Negara*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2019
- Kartini Mulyadi. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang dalam Rudhy A. Lontoh (ed.). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Khalimi; *Hukum Keuangan Negara*, Bandung, Pustaka Setia, 2019
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*; Yogyakarta; BPF 2003.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2013.
- , *Perbuatan melawan Hukum*: Bandung;Citra Aditya Abadi, cetakan keempat 2013.
- Nomensen Sinamo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Bumi Inti Tama sejahtera, 2011
- Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Alumni, 1992.
- Patrick F.J.Arthur E, Appleton, Michael, Plummer, Springer. *The World Trade Organization, "Legal, Economic and Political Analysis"*, Vol.1, Edited by Internasional Trade Law Center.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- R. F. Saragih, dan Erna, Widjajati, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta, Roda Inti Media, 1991.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Penerbit PT. Eresco 1989.
- Ribut Sugianto & Arfin: *Mengenal Fasilitas Kawasan Berikat; Jakarta; Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, 2022.*

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.
- Romli Atmasasmita; *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Saidi Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- , *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Radjawali, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2007.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2005.
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan XVII*, Jakarta: Intermasa, 1983.
- Sudikno Mertokusumo; *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini; *Hukum Kepailitan*; Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2008
- Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, Depok, Cet. 2, 2018.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1982

## **B. Makalah, Artikel, Jurnal**

L.Y. Hari Sih Advianto, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia”, *Simposium Nasional Keuangan Negara, Pengadilan pajak. (2018)*

Ali Abdul Wakhid, “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia” *Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung*

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulissrudatin, “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marskal Surayadarma*, Vol. 7 no. 1 (September 2016).

Ravina Fazrin dan Mahendra Wardhana, Kedudukan Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Perusahaan Asuransi Yang pailit Terhadap Hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta, *Fakultas Hukum-Universitas Negeri Surabaya*

Rismansyah Thohir, Analisis yuridis Kedudukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Kreditur Serta Penyelesaian Perkara Pailit Yang terjadi Pada Perusahaan Kawasan Berikat, *Jurnal Universitas Pakuan* Vol. 06 No,2 (Desember 2020)

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan denmi kepentingan umum,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak

Indonesia; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*,

Indonesia Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU No.18 tahun 2002,

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat,

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang menjadi Milik Negara.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK .04/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat

Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 point ketiga.

#### **D. Internet**

<https://www.pajakku.com/read/60d4312c58d6727b1651ac2f/Mengenal-Kawasan-Berikat-dan-Fasilitas-yang-Diberikan>

<https://butew.com/2018/10/25/hubungan-hukum-administrasi-negara-dengan-hukum-tata-negarapidana-dan-perdata>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-upah-buruh-vs-utang-pajakmana-yang-didahulukan-pembayarannya-2019-11-05-2cebdf51/>

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118,](https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118)

<https://news.ddtc.co.id/mengapa-surat-paksa-bisa-sampai-diterbitkan-ini-alasannya-24785>

[https://kbbi.web.id/pengaman,](https://kbbi.web.id/pengaman)

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-221.pdf>

<https://insanpelajar.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/diunduh> 19 Juli 2022

<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/kebijakan-fiskal-adalah>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak-Self-Assessment>



